



Pengaruh Dana Perimbangan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Dina Marsella^{1*}, Rindu Rika Gamayuni²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: marselladina22@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of balancing funds consisting of revenue sharing funds (DBH), general allocation funds (DAU), physical special allocation funds (DAK physical), health operational assistance funds (DBOK), and education operational assistance funds (DBOP) on income inequality as measured by the Gini ratio in 34 provinces in Indonesia during the period 2020-2024. This study uses a quantitative approach with panel data regression methods. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The findings of this study indicate that the allocation of DBH and DAU has a negative and significant effect on reducing income inequality. Meanwhile, the allocation of DAK physical and DBOK has not had a significant effect on income inequality. In addition, DBOP has a positive and significant effect on income inequality. It is hoped that local governments can improve their financial management so that the function of fiscal equalization funds to equalize regional development, reduce income inequality, and improve the welfare of the community can be achieved optimally and not only felt by a few parties.*

Keywords: *Fiscal Balance Funds; Fiscal Federalism; Income Inequality; Indonesia; Panel Data.*

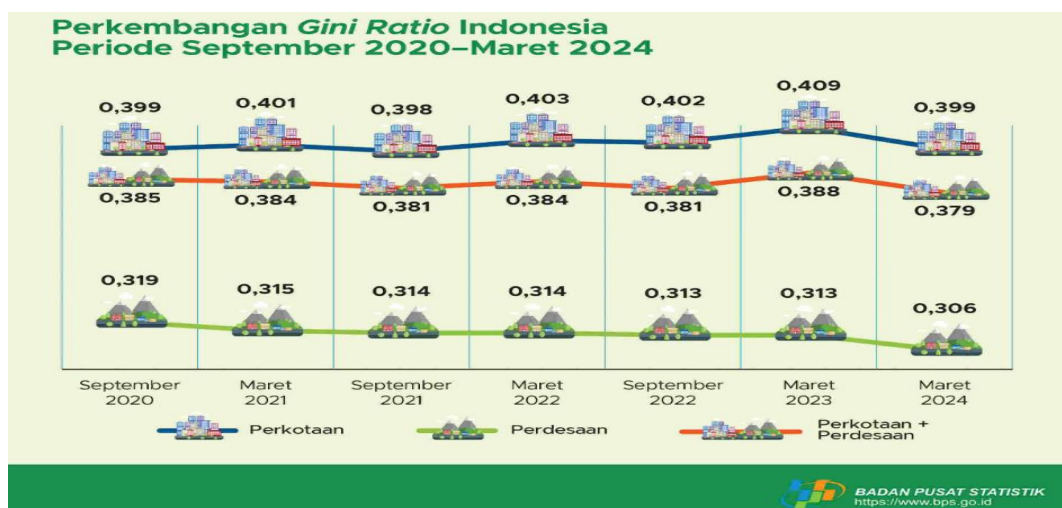
Abstrak. Penelitian ini bermaksud guna menganalisa dampak dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK Fisik), dana bantuan operasional kesehatan (DBOK), dan dana bantuan operasional pendidikan (DBOP) terhadap ketimpangan pendapatan yang diukurkan oleh menggunakan rasio gini pada 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024. Riset ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Temuan riset ini memperlihatkan bahwasannya Alokasi DBH serta DAU memiliki dampak negatif dan signifikan pada menurunnya ketimpangan pendapatan. Sedangkan alokasi DAK Fisik dan DBOK belum memberi dampak yang nyata dan signifikan pada ketimpangan pendapatan. Selain itu, DBOP memberi dampak positif serta signifikan pada ketimpangan pendapatan. Diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki kembali tata kelola keuangan daerahnya agar fungsi dana perimbangan untuk meratakan pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta mensejahterakan masyarakat dapat dicapai secara maksimal dan tidak hanya dirasakan oleh beberapa pihak.

Kata kunci: Dana Perimbangan; Data Panel; Federalisme Fiskal; Indonesia; Ketimpangan Pendapatan.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pendapatan masih menjadi suatu permasalahan berkelanjutan yang ada pada setiap negara, termasuk di Indonesia. Permasalahan ini juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 10 yang salah satu tujuannya ialah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, baik di dalam suatu negara maupun antarnegara. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menunjukkan bahwa pencapaian SDGs Nomor 10 masih memerlukan strategi yang lebih efektif dalam distribusi sumber daya ekonomi. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal melalui alokasi dana perimbangan yang ditujukan untuk mendukung daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan kapasitas pendanaan yang terdapat di pemerintah pusat serta daerah.

World Bank menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang dan sulit untuk diatasi sepenuhnya. Di Indonesia hampir semua wilayah menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Upaya menanggulangi kemiskinan belum bisa dilaksanakan secara terpisah dari faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai permasalahan kompleks lain yang saling berhubungan pada kemiskinan itu sendiri (Salsabila et al., 2022).



Gambar 1. Perkembangan Rasio Gini di Indonesia Periode September 2020-Maret 2024.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Berlandaskan data Badan Pusat Statistik, rasio gini nasional di maret 2024 terdata menurun menjadi sebesar 0,379 dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023. Namun, angka tersebut masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang dan mencerminkan distribusi pendapatan yang berjalan relatif lambat. Ketimpangan pada daerah perkotaan boasanya lebih besar dari daerah perdesaan. Tercatat di bulan Maret 20204 daerah perkotaan memiliki indeks rasio gini sebesar 0,399, sedangkan daerah perdesaan memiliki indeks rasio gini lebih rendah di angka 0,306. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada daerah perkotaan lebih berpeluang mengalami kesenjangan ekonomi, sementara masyarakat daerah perdesaan relatif memiliki distribusi yang lebih merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada masyarakat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial, yang akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi negara (Bakar & Rahmawan, 2021). Jika tidak segera diatasi, kesenjangan juga dapat memperburuk akses masyarakat terutama masyarakat miskin guna memperoleh pelayanan dasar seperti kesehatan dan Pendidikan, sehingga menambah risiko kemiskinan dalam jangka panjang (Rahma, 2024).

Melalui teori federalisme fiskal (*fiscal federalism*), yang menekankan pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, pemerataan distribusi, serta stabilitas ekonomi antar daerah. Menurut Musgrave & Musgrave (1984) dan Oates (1972) dalam teori federalisme fiskal, pemerintah pusat dinilai lebih efektif untuk menjalankan fungsi dari stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan, sedangkan pemerintah daerah diarahkan untuk melaksanakan fungsi alokasi sumber daya melalui desentralisasi. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah daerah. Peraturan ini mengatur bahwasannya Dana perimbangan yakni dana yang sumbernya dari APBN dan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bermaksud guna meminimalisir ketimpangan fiskal, menambah kapasitas keuangan antar daerah, lalu meningkatkan penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas.

Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting pada perekonomian suatu negara. Peningkatan investasi di bidang pendidikan serta kesehatan merupakan bentuk investasi produktif yang dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas individu, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan (Arbianti & Suchaina, 2025). Pendidikan berperan penting dalam membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menambah produktivitas dan kemampuan bersaing tenaga kerja. Sementara itu, kondisi kesehatan yang baik memudahkan individu agar bisa bekerja dengan produktif dan efisien, jadi mampu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Kaloko et al., 2025).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kedua aspek tersebut melalui kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) serta Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP). Anggaran ini dialokasikan guna memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu layanan dasar di bidang kesehatan serta pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui DBOK, pemerintah berupaya memperluas layanan kesehatan dasar, menekan angka kematian ibu dan anak, serta prevalensi stunting yang berdampak jangka panjang terhadap produktivitas manusia. Sementara itu, DBOP diarahkan untuk mendukung pemerataan kesempatan Pendidikan, membiayai operasional sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kualitas Pendidikan dengan pengembangan kompetensi pendidik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Federalisme Fiskal (Fiscal Federalism)

Menurut Musgrave (1984) dan Oates (1972) teori federalisme fiskal menekankan pentingnya pembagian kewenangan penerimaan dan pengeluaran antar tingkat pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai posisi lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat, diharapkan dapat lebih mengetahui kondisi serta kebutuhan masyarakat sehingga dengan kewenangan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Amalia & Haryanto (2019) teori federalisme fiskal menjelaskan keterkaitan antara desentralisasi dengan aspek ekonomi, penyediaan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan penduduk. Teori ini menggambarkan bagaimana pemerintah pusat merancang berbagai alokasi anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan menambah pendapatan pemerintah daerah sehingga dapat direalisasikan melalui berbagai program kebijakan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat mensejahterakan dan mengurangi angka kemiskinan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Berlandaskan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) yakni anggaran yang asanya dari penghasilan APBN serta diberikan untuk daerah berlandaskan pembagian tertentu guna mendanai berbagai keperluan daerah sebagai upaya penerapan desentralisasi. Alokasi DBH bertujuan untuk merubah keseimbangan fiskal diantara pemerintah pusat serta daerah dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dipunya oleh daerah penghasil.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berlandaskan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang berasal dari penghasilan APBN yang diberikan guna meratakan kemampuan fiskal antar daerah dan memenuhi berbagai keperluan daerah menjadi bagian dari penerapan kebijakan desentralisasi. Besaran DAU ditentukan dengan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Bersih (PDN). Alokasi DAU berbentuk “block grant”, yaitu pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menggunakan DAU sesuai prioritas daerah dan sejalan dengan prinsip desentralisasi serta otonomi daerah. Penentuan besaran DAU untuk suatu daerah bergantung pada tingkat kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) daerah tersebut, yang didefinisikan sebagai selisih iantara keperluan fiskal (*fiscal need*) serta kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) (Yuliantoni & Indra Arza, 2021).

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.07/2021 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang iberikan dari APBN untuk daerah tertentu.

Penyaluran ini ditujukan guna mendukung pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta fasilitas layanan publik di tingkat daerah. Adapun sasaran utama dari DAK Fisik meliputi pencapaian target prioritas pembangunan nasional, akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik khusus dalam rangka memperkecil kesenjangan dalam penyediaan layanan publik, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah otonom.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yakni bantuan anggaran dari pemerintahan pusat lewat Kementerian Kesehatan dengan tujuan guna mempermudah pemerintahan daerah menjalani pelayanan kesehatan berlandaskan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan guna mempermudah target Millenium Development Goals (MDGs) dengan peningkatan kapasitas dan kinerja puskesmas beserta jaringannya, termasuk Pos Kesehatan Desa (Poskedes) serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat (Septyantie & Cahyadin, 2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 menyatakan bahwa sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang bertujuan guna menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan dorongan dana transfer ke daerah dalam bentuk bantuan operasional kesehatan yang sumbernya dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Dana Bantuan Alokasi Kesehatan terdiri atas DBOK Dinas Provinsi dan DBOK Puskesmas Kabupaten/Kota yang perhitungannya mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah kerja, kondisi epidemiologi dan karakteristik daerah, tingkat penyerapan anggaran tahun sebelumnya, serta tingkat kepatuhan dalam penyampaian pelaporan.

Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP)

Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.07/2022 menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang disalurkan guna membiayai kebutuhan operasional non personalia pada satuan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) terdiri dari tiga kategori, yakni: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan). Besaran alokasi sesuai satuan biaya yang ditetapkan untuk setiap daerah dikalikan dengan jumlah siswa yang tercatat di Dapodik.

Ketimpangan Pendapatan

Todaro & Smith (2006) mengatakan ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan pada masyarakat di dalam suatu wilayah yang sama. Ketimpangan pendapatan juga dapat diartikan sebagai perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi antara

masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah yang terlihat dari pendapatan yang mereka peroleh. Selanjutnya, menurut Kuncoro (2010) ketimpangan pendapatan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, kondisi geografis, dan faktor produksi yang ada pada masing-masing daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) Gini Ratio atau sering disebut indeks gini merupakan parameter yang dipakai guna mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Rumus yang dipakai pada menghitung gini rasio ialah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=0}^n f_i(Y_i + Y_{i-1})$$

Dimana:

GR = Gini Ratio

f_i = Jumlah persentase penduduk dalam tingkatan pendapatan ke- i

Y_i = Jumlah persentase kumulatif penghasilan hingga kelas- i

Y_{i-1} = Jumlah persentase kumulatif penghasilan pada kelas sebelumnya ($i-1$)

Dalam mengukur Rasio Gini kisaran nilai berada diantara 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin rendah atau mendekati nol (0) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata pada wilayah tersebut. Namun sebaliknya, rentang nilai yang semakin besar atau mendekati satu (1) menunjukkan pendapatan yang tidak merata atau semakin tinggi ketimpangan pendapatan pada wilayah tersebut. Indeks gini yang berada dibawah 0,30 termasuk pada Tingkat Ketimpangan Pendapatan (TKP) rendah, indeks 0,30 – 0,50 termasuk pada TKP sedang, dan indeks diatas 0,50 termasuk pada TKP tinggi Andrianus & Said (2006).

Kerangka Konseptual

Hasil penelitian oleh Azizi (2018) menunjukkan Dana Bagi Hasil mempunyai dampak negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini juga dibuktikan oleh Purba & Simandjorang (2024), DBH berpengaruh negatif dan signifikan pada Pemerintah Sumatera Utara yang dapat merancang dan mengelola DBH dengan baik sehingga mampu untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Dengan kata lain, Peningkatan alokasi DBH pada suatu daerah cenderung menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan daerah tersebut. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis pertama pada riset ini bisa dirumuskan yakni:

H₁ = Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

Menurut Putri & Natha (2014) Dana Alokasi Umum berdampak negatif pada ketimpangan penghasilan di Indonesia, jika jumlah Dana Alokasi Umum dipergunakan guna mendanai belanja pembangunan dibandingkan belanja rutin. DAU yang lebih banyak

digunakan untuk belanja pembangunan pada suatu daerah akan menjadikan meningkatnya pendapatan sehingga ketimpangan akan berkurang (Ridho & Wijayanti, 2022). Maka dari itu, hipotesis kedua dalam riset ini dirumuskan yakni:

H₂= Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

Riset Wahyuni et al. (2021) menemukan bahwa DAK Fisik pada bidang jalan, sanitasi, perumahan dan pemukiman, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta pasar dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari (2025) dengan peningkatan DAK Fisik yang diiringi peningkatan jumlah pembangunan di setiap daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan akhirnya menekan tingkat ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, hipotesis ketiga riset ini dirumuskan ialah:

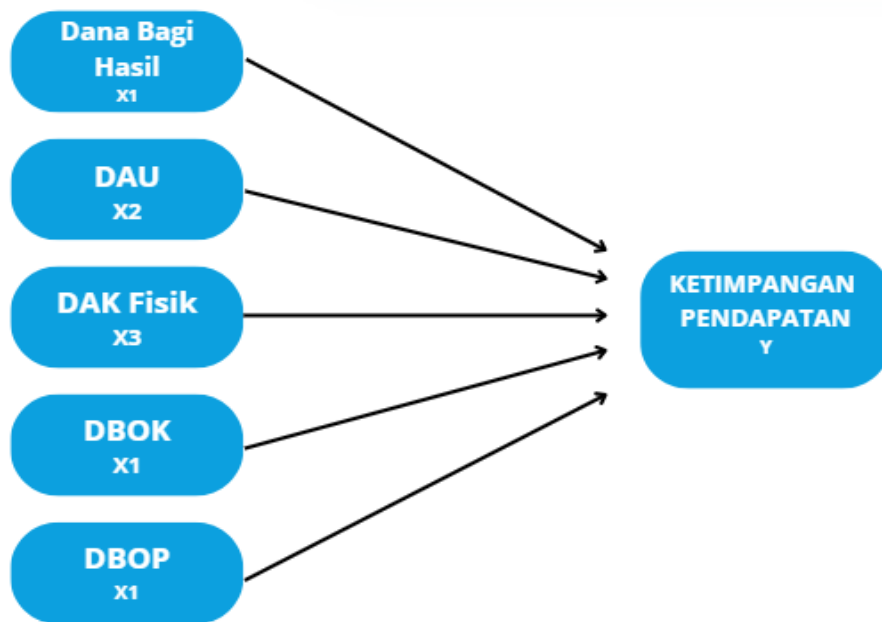
H₃= Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

Riset yang dilakukan oleh Purba & Simandjorang (2024) pada pemerintah daerah di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dengan pengelolaan dana yang baik akan berdampak pada realisasi belanja pemerintah pada bidang kesehatan akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil tersebut juga diperkuat oleh Furceri et al. (2021) menyatakan belanja pemerintah pada sektor kesehatan mampu membantu mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan saat pandemi Covid-19. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis keempat pada riset ini dirumuskan yakni:

H₄ = Dana Bntuan Operasional Kesehatan (DBOK) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

Menurut Putri (2023) kebijakan pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pendapatan perlu terdiri dari bertambahnya mutu sumber daya manusia dengan kesetaraan pendidikan hingga daerah terpencil, dengan kemudahan akses, biaya yang terjangkau, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendorong kenaikan mutu sumber daya manusia. Dengan bertambahnya mutu sumber daya manusia yang tercermin dari rata-rata tingkat pendidikan masyarakat dapat mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang merata, sehingga individu dengan pendidikan yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak (Fadila & Idris, 2025). Hal ini perkuat oleh penelitian Rindiani et al. (2025) kebijakan pemerintah di bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis kelima pada riset ini dirumuskan yakni:

H₅ = Dana Bantuan Operasional Pendidikan (DBOP) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan



Gambar 2. Kerangka Konseptual.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Riset ini menggunakan metode analisa regresi data panel, yang menyatukan data *time series* periode 2020 sampai 2024, dan data cross-sectional yang terdiri dari tiga puluh delapan (34) provinsi yang terdapat di Indonesia. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang didapatkan dari Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Direktorat Jenderal Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Populasi dan Sample

Populasi yang digunakan ialah semua provinsi yang ada di Indonesia. Mengambil sample yang dipakai pada riset ini yakni metode *purposive sampling*, yakni dengan kriteria provinsi yang memiliki data indeks gini yang terdaftar di Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024.

4. HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Table 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

Statistik	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.34	4247.58	11254.62	1505.68	328.60	1680.51
Median	0.34	2011.50	8251.00	1352.50	249.00	914.00
Maximum	0.46	42496.00	41449.00	3812.00	1486.00	10729.00
Minimum	0.24	70.00	0.00	3.00	0.00	178.00
Std. Dev.	0.04	6211.74	9176.67	914.32	269.12	2155.16
Skewness	0.25	2.93	1.80	0.80	1.83	2.68
Kurtosis	2.67	14.11	5.58	2.80	6.53	9.78
Observations	170	170	170	170	170	170

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Berlandaskan analisis statistik deskriptif, dilakukan pengamatan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) serta lima variabel independen yang meliputi dari Dana Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus Fisik (X3), Dana Alokasi Khusus Nonfisik Operasional Kesehatan (X4), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Operasional Pendidikan (X5). Statistik deskriptif dipakai guna menyajikan gambaran umum terkait kategori data sebelum melakukan analisis regresi data panel. Total observasi penelitian ini berjumlah 170. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata-rata ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia periode 2020–2024 sebesar 0,34 (kategori sedang), dengan variasi kecil antarprovinsi. Rata-rata Dana Bagi Hasil (X1) sebesar Rp 4,25 triliun menunjukkan ketimpangan besar karena perbedaan sumber daya alam, di mana Papua menerima paling besar dan DKI Jakarta paling kecil. Dana Alokasi Umum (X2) rata-rata Rp 11,25 triliun juga bervariasi tinggi; DKI Jakarta tidak menerima DAU, sedangkan Jawa Timur memperoleh alokasi tertinggi. Dana Alokasi Khusus Fisik (X3) rata-rata Rp 1,50 triliun, dengan Jawa Tengah menerima terbesar karena kebutuhan infrastruktur tinggi. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan (X4) rata-rata Rp 328,60 miliar, tertinggi di Jawa Barat dan terendah di DKI Jakarta yang tidak mendapat alokasi. Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Pendidikan (X5) rata-rata Rp 1,68 triliun, tertinggi di Jawa Barat dan terendah di Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, distribusi dana transfer pusat masih menunjukkan ketimpangan antarprovinsi yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, sumber daya alam, dan kebutuhan layanan publik daerah.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi memakai teknik regresi data panel dapat dilaksanakan dengan memakai tiga pendekatan model, yakni *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Setelah melakukan pengujian tiap model diperoleh hasil yakni:

Common Effect Model (CEM)

Table 2. Output Estimasi CEM.

Variable	Estimate	p-value
C	0.345215	0.0000
X1	-4.27E-07	0.4266
X2	-3.75E-06	0.0070
X3	8.09E-06	0.3068
X4	1.32E-06	0.9710
X5	1.83E-05	0.0000

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Perolehan *Common Effect Model (CEM)* dengan kelima variabel yang diteliti, dapat didapatkan bahwa hanya DAU yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sehingga dengan meningkatnya DAU ini dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sedangkan DBOP juga berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah yang positif, yang berarti peningkatan DBOP juga berkontribusi dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan. Adapun DBH, DAK Fisik, dan DBOP tidak memiliki dampak yang nyata dan signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Fixed Effect Model (FEM)

Table 3. Output Estimasi FEM.

Variable	Estimate	p-value
C	0.314294	0.0000
X1	-8.43E-07	0.0113
X2	-2.14E-06	0.0252
X3	4.72E-06	0.1919
X4	-3.06E-06	0.7986
X5	3.08E-05	0.0075

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Dari hasil *Fixed Effect Model (FEM)* dengan kelima variabel yang diteliti, didapatkan bahwa DBH dan DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sehingga peningkatan dari kedua dana tersebut dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sedangkan DBOK juga berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah yang positif, yang berarti peningkatan DBOK juga

berkontribusi dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan. Adapun DAK Fisik serta DBOP tidak memiliki dampak yang nyata dan signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Random Effect Model (REM)

Table 4. Output Estimasi REM

Variable	Estimate	p-value
C	0.337315	0.0000
X1	-7.62E-07	0.0175
X2	-1.83E-06	0.0314
X3	5.22E-06	0.1404
X4	-4.59E-06	0.6978
X5	1.47E-05	0.0008

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Perolehan *Random Effect Model (REM)* dengan kelima variabel yang diteliti, didapatkan bahwa DBH dan DAU memiliki pengaruh 162angkah162 dan signifikan, sehingga peningkatan dari kedua dana tersebut dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sedangkan DBOP juga berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah yang positif, yang berarti peningkatan DBOP juga berkontribusi dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan. Adapun DAK Fisik dan DBOK belum mempunyai dampak yang nyata serta signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Setelah didapatkan perolehan ketiga model estimasi regresi data panel yakni *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*, 162angkah selanjutnya yakni pemilihan model manakah yang paling sesuai guna mengestimasi persamaan regresi data panel melalui beragam pengujian, yakni:

Uji Chow

Table 5. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	67.434143	(33.131)	0.0000
Cross-section Chi-square	491.242520	33	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, Data Diolah 2025.

Hipotesis dalam uji *Chow* adalah sebagai berikut:

H₀: Apabila skor probabilitas *Cross-section F* > tingkat signifikansi 0,05 sehingga model yang paling sesuai yakni *Common Effect Model (CEM)*.

H₁: Apabila skor probabilitas *Cross-section F* < tingkat signifikansi 0,05 sehingga model yang paling sesuai yakni *Fixed Effect Model (FEM)*.

Berdasarkan perolehan pengujian *Chow* diatas, didapatkan bahwasannya skor Probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 ($< 0,05$) yang berarti H_0 ditolak. Maka dari itu, model yang sesuai guna mengestimasi persamaan regresi dalam penelitian ini ialah ***Fixed Effect Model (FEM)***.

Uji Hausman

Table 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	3.835569	5	0.5733

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Uji *Hausman* dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Apabila skor probabilitas *Cross-section random* $>$ tingkat signifikansi 0,05 sehingga model yang paling sesuai yakni *Random Effect Model (REM)*.

H_1 : Apabila skor probabilitas *Cross-section random* $<$ tingkat signifikansi 0,05 sehingga model yang paling sesuai yakni *Fixed Effect Model (FEM)*.

Dari perolehan uji *Hausman* diatas, didapatkan bahwa nilai Probailitas *Cross-section random* sejumlah 0,5733 ($> 0,05$) maka H_0 diterima. Oleh karna itu, model yang paling sesuai untuk mengestimasi persamaan regresi dalam penelitian ini yakni ***Random Effect Model (REM)***.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Table 7. Hasil Uji LM.

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypotesis		
	Cross-section	Time	Prob.
Breusch-Pagan	290.5581	1.953146	292.5112
	(0.0000)	(0.1622)	(0.0000)

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Uji *Lagrange Multipler (LM)* dilaksanakan dengan menguji hipotesis yakni:

H_0 : Bila skor probabilitas *Cross-section Breusch-Pagan* $>$ tingkatan signifikansi 0,05 sehingga model yang paling sesuai yakni *Common Effect Model (CEM)*.

H_1 : Bila skor probabilitas *Cross-section Breusch-Pagan* $<$ tingkatan signifikansi 0,05 sehingga model yang paling sesuai yakni *Random Effect Model (REM)*.

Berlandaskan perolehan uji *Lagrange Multipler (LM)* diatas, didapatkan skor Probailitas *Cross-section random* sejumlah 0,0000 ($< 0,05$) artinya H_0 ditolak. Maka dari itu,

model yang paling sesuai guna mengestimasi persamaan regresi dalam penelitian ini yakni **Random Effect Model (REM)**.

Berdasarkan pemilihan model regresi data panel dengan uji *Chow*, uji *Hausman*, serta uji LM diperoleh bahwa model terbaik yang dipakai ialah **Random Effect Model (REM)**. Model ini menggunakan pendekatan *Generalized Least Square (GLS)* yang memiliki keunggulan dalam memperoleh estimasi yang tidak bias, konsisten, dan varians yang minimal sehingga menghasilkan model penduga yang lebih baik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik tidak diperlukan dalam model ini (Hijrawati et al., 2022; Kosmaryati et al., 2019; S. A. Putri et al., 2025). Oleh karena itu, persamaan regresi data panel serta uji hipotesis dapat dilanjutkan memakai **Random Effect Model (REM)**.

Analisis Regresi Data Panel

Table 8. Hasil Analisis Regresi Data Panel.

Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 09/20/2025 Time: 22:26 Sample: 2020 2024 Periods included: 5 Cross-sections included: 34 Total panel (balanced) observations: 170 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.337315	0.009546	35.33622	0.0000
X1	-7.62E-07	3.17E-07	-2.399844	0.0175
X2	-1.83E-06	8.44E-07	-2169948	0.0314
X3	5.22E-06	3.53E-06	1.481300	0.1404
X4	-4.59E-06	1.18E-05	-0.388921	0.6978
X5	1.47E-05	4.32E-09	3.400191	0.0008

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Dari tabel di atas didapatkan persamaan regresi data panel menggunakan model REM yakni:

$$\text{Indeks Gini}_{it} = 0.337315 - 7,62\text{E-}07 X1_{it} - 1,83\text{E-}06 X2_{it} + 5.22\text{E-}06 X3_{it} - 4.59\text{E-}06 X4_{it} + 1.47\text{E-}05 X5_{it}$$

Dari hasil persamaan regresi data panel di atas, didapatkan nilai konstanta (C) menunjukkan koefisien sebesar 0,337315 dengan tingkatan signifikansi 0,0000 ($< 0,05$). Hasil tersebut menandakan bahwasannya ketika semua variabel independen bernilai nol, maka tingkat ketimpangan pendapatan terdapat pada kisaran 0,3265.

Dana Bagi Hasil (X1), menunjukkan koefisien sebesar -7.62E-07 artinya, setiap peningkatan 1% DBH dapat menurunkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini sebesar 7,62E-07 dengan dugaan variabel independen lainnya tetap. Dana Alokasi Umum

(X2) menunjukkan koefisien sebesar $-2.14E-06$ artinya, setiap peningkatan 1% DAU dapat menurunkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini sebesar $2.14E-06$ dengan asumsi bahwa variabel independen tidak berubah.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Fisik (X3), memiliki arah koefisien positif sebesar $5.22E-06$ artinya, setiap peningkatan 1% DBH dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini sebesar $5.22E-06$ dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (X4) memiliki nilai koefisien sebesar $-4.59E-06$ artinya, setiap peningkatan 1% DBH dapat menurunkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini sebesar $4.59E-06$ dengan dugaan bahwasannya variabel independen lainnya belum berganti. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (X5) memiliki koefisien sebesar $1.47E-05$ artinya, setiap peningkatan 1% DBH dapat menurunkan ketimpangan pendapatan yang cerminkan dengan rasio gini sebesar $1.47E-05$ dengan dugaan variabel independen yang lainnya tetap.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Table 9. Hasil Uji t.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.337315	0.009546	35.33622	0.0000
X1	$-7.62E-07$	$3.17E-07$	-2.399844	0.0175
X2	$-1.83E-06$	$8.44E-07$	-2169948	0.0314
X3	$5.22E-06$	$3.53E-06$	1.481300	0.1404
X4	$-4.59E-06$	$1.18E-05$	-0.388921	0.6978
X5	$1.47E-05$	$4.32E-09$	3.400191	0.0008

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Berlandaskan hasil uji parsial (t-statistic) diatas, diketahui Dana Bagi Hasil (X1), menunjukkan koefisien sebesar -2.399844 dengan tingkat probabilitas 0.0175 ($< 0,05$). Artinya, Dana Bagi Hasil mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Demikian menandakan bahwasannya peningkatan DBH dapat memberi dampak pada berkurangnya ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi.

Dana Alokasi Umum (X2) menunjukkan koefisien sebesar -2.169948 dengan probabilitas 0.0314 ($< 0,05$). Artinya, DAU berpengaruh negatif serta signifikan pada ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan DAU berpengaruh nyata dan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan.

Berbeda dengan DBH dan DAU, Dana Alokasi Khusus Fisik (X3), menunjukkan koefisien sebesar 1.481300 dengan probabilitas 0.1404 ($> 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan

meskipun DAK Fisik memiliki arah positif (cenderung meningkatkan ketimpangan), namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (X4) memperoleh tingkat koefisien sebanyak -0.388921 dengan probabilitas 0,6978 ($> 0,05$). Perolehan ini memperlihatkan bahwasannya meskipun DBOK memiliki arah negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan. Artinya, setiap kenaikan DBOK tidak berpengaruh nyata terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Pendidikan (X5) memiliki koefisien sebesar 3.400191 dan probabilitas sebanyak 0,0008 ($< 0,05$). Memperlihatkan bahwasannya DBOP berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah yang positif, yang berarti peningkatan DBOP juga berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Table 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Statistic	Value
Adjusted R-squared	0.079086

Sumber: Output EViews 12, Data Diolah 2025.

Berlandaskan perolehan uji koefisien determinasi, skor *Adjusted R-squared* sebanyak 0,079086 memperlihatkan bahwasannya variabel-variabel independen yang dipakai pada riset ini, yaitu Dana Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus Fisik (X3), Dana Alokasi Khusus Nonfisik Operasional Kesehatan (X4), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Operasional Pendidikan (X5), secara bersamaan dapat menjelaskan 7,91% variasi pada variabel Ketimpangan Pendapatan (Y). Sedangkan 92,09% variasi sisanya dirubah oleh berbagai aspek lainnya di luar model riset ini, seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, maupun variabel lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan perolehan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasannya Dana Bagi Hasil (X1) memperoleh nilai koefisien sebesar -7.62E-07 dan nilai signifikansi sebanyak 0,0175 kurang dari tingkatan signifikansi 0,05, maka hipotesis pada riset ini terdukung. Sesuai dengan teori federalisme fiskal mengenai pembagian wewenang antar pemerintahan yang bermaksud guna menambahkan kesejahteraan masyarakat yang diterapkan melalui desentralisasi fiskal (Oates, 1972). Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditentukan oleh UU No. 33 Tahun 2004 mengenai dana perimbangan yang salah satu komponennya ialah Dana Bagi Hasil (DBH), dengan tujuan memperbaiki keseimbangan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah berdasarkan *prinsip by origin*. Dengan demikian, daerah yang mampu

mengelola potensi sumber daya alam dan pajaknya secara optimal akan memperoleh porsi DBH yang lebih besar, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik dan mendorong pemerataan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Alokasi Umum (X2) memiliki koefisien sebesar $-1.83E-06$ dengan tingkatan signifikansi sebanyak 0.0314 kurang dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis pada riset ini terdukung. Sesuai pada teori federalisme fiskal yang menekankan pentingnya pembagian wewenang antar pemerintahan melalui desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1972). Pelaksanaan desentralisasi ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi guna menyamakan keuangan antar daerah serta mendukung penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Agar lebih efektif, DAU perlu diarahkan pada pembiayaan proyek strategis seperti peningkatan keterampilan masyarakat sehingga SDM meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pemerataan pendapatan (Sari, 2025). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ridho & Wijayanti (2022) menemukan bahwa DAU berdampak negatif dan signifikan pada penurunan ketimpangan pendapatan.

Dana Alokasi Khusus Fisik (X3) memperoleh nilai koefisien sebesar $5,22E-06$ dengan tingkat signifikansi sebanyak 0,1404 melebihi 0,05. Maka hipotesis ketiga tidak terdukung. Perolehan riset ini tidak sesuai pada teori federalisme fiskal, dengan pemberian DAK Fisik untuk mendanai kegiatan tertentu dan mendukung pembangunan infrastruktur dasar serta pemerataan pembangunan. Namun dalam penerapannya DAK Fisik belum mampu memenuhi tujuannya. Temuan ini didukung oleh Awaludin & Wibowo (2023); Purba & Simandjorang (2024); Supriyanto & Utomo (2024) yang menemukan bahwa DAK Fisik belum memperlihatkan dampak yang signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (X4) memperoleh nilai koefisien sebesar $-4,59E-06$ dengan nilai signifikansi sebanyak 0,6978 melebihi 0,05. Maka hipotesis keempat belum terdukung. Meski demikian, Perolehan ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan teori federalisme fiskal mengenai pembagian wewenang antar pemerintahan melalui desentralisasi fiskal, pemberian Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DBOK) yang diatur pada Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 yang bertujuan guna meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan, namun efektivitasnya masih mengalami kendala. Keterlambatan pencairan dana, lemahnya transparansi dan koordinasi antar instansi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan menyebabkan tujuan DBOK dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan

mengurangi ketimpangan belum sepenuhnya tercapai (Saputri & Sri Muniarti, 2023). Temuan ini sejalan dengan (Khuzaimah et al., 2025) dan (Hanggraini et al., 2023).

Hasil dari pengujian ditemukan bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (X5) memiliki nilai koefisien sebesar $1.47E-05$ dengan skor signifikansi 0,0008 kurang dari taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung. Teori federalisme fiskal menekankan pentingnya pembagian wewenang antar pemerintahan melalui desentralisasi, namun keberhasilannya bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana yang diberikan. Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No.204/PMK.07/2022, pemberian Dana Alokasi Khusus Nonfisik berupa DBOP ditujukan untuk pemerataan pendidikan, pembiayaan operasional sekolah, serta peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik. Namun, implementasinya masih belum optimal. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Tengah (2024) mengungkap adanya penyalahgunaan Dana BOS akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi, sehingga kualitas pendidikan hanya meningkat di wilayah dengan penggunaan manajemen dana yang baik, sementara di daerah lain dapat memperlebar kesenjangan. temuan ini sejalan dengan studi (Sari dkk., 2021) serta (Fadila & Idris, 2025).

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, A. F. A. N., & Haryanto. (2019). *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012–2017*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8.
- Andrianus, F., & Said, M. (2006). *Analisis sektor unggulan, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Studi kasus Sumatera Barat tahun 1987–2002)*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 8(1), 9–17.
- Arbianti, S., & Suchaina. (2025). *Peran pendidikan dan kesehatan dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia: Pendekatan human capital*. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(1), 54–64. <https://doi.org/10.35448/jequ>
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus fisik, dan dana desa terhadap kemiskinan dan PDRB daerah tertinggal*. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Azizi, M. (2018). *Dampak dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap ketimpangan produk domestik regional bruto di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2005–2014*. *Jurnal Kritis*, 2(1), 1–32.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Tengah. (2024). *Penyalahgunaan dana BOS, bukti pengawasan Disdik lemah*. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita resmi statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

- Bakar, A., & Rahmawan, R. (2021). *Analisis pengaruh dana bantuan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat*. *LITERATUS*, 3(1), 147–151. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.334>
- Fadila, Y. B., & Idris. (2025). *Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat*. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 2(3), 738–747. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Furceri, D., Loungani, P., Ostry, J. D., & Pizzuto, P. (2021). *The rise in inequality after pandemics: Can fiscal support play a mitigating role?* IMF Working Paper, WP/21/120. <https://doi.org/10.5089/9781513582405.001>
- Hanggraini, M., Agustar, A., & Jafrinur. (2023). *Pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dan implikasinya terhadap pelayanan pada puskesmas rawat inap di Kabupaten Lima Puluh Kota*. *Jurnal Niara*, 15(3), 551–560. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.12657>
- Hijrawati, Wibawa, G., Yahya, I., Baharuddin, Rahman, G., & Agusrawati. (2022). *Analisis regresi data panel pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara tahun 2017–2020*. *Jurnal Matematika, Komputasi, dan Statistika*, 2(3). <https://doi.org/10.33772/jmks.v2i3.25>
- Kaloko, N., Sihombing, N., Lubis, S. A., & Tanjung, T. P. R. (2025). *Peran strategis pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi: Membangun human capital untuk masa depan*. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 291–298. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.707>
- Khuzaimah, S., Pramudho, K., & Zaharudin. (2025). *Evaluasi dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.45509>
- Kosmaryati, Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia tahun 2011–2016 dengan regresi data panel*. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1). <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932>
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika pembangunan: Masalah, kebijakan, dan politik*. Erlangga.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1984). *Public finance in theory and practice* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal decentralization and economic development*. *National Tax Journal*, 25(2), 237–243. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789013>
- Purba, S., & Simandjorang, B. (2024). *Pengaruh dana perimbangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara*. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), 141–155. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.887>
- Putri, D. A. A. (2023). *Pengaruh disparitas pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, 2(1), 29–46. <https://doi.org/10.26593/pedr.v2i1.7416>
- Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.

- Putri, S. A., Widiarti, & Nurvazly, D. E. (2025). *Kajian model regresi data panel pada data indeks pembangunan manusia Provinsi DKI Jakarta tahun 2019–2023*. *Math Unesa Jurnal Ilmiah Matematika*, 13(1), 117–124. <https://doi.org/10.26740/mathunesa.v13n1.p117-124>
- Rahma, G. A. (2024). *Pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia: Analisis regresi kuantil*. *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, 3(2), 108–117. <https://doi.org/10.26593/gcebnb07>
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). *Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>
- Rindiani, S., Ruslan, F., & Sofyan, S. (2025). *Peran pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap ketimpangan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 33–44. <https://doi.org/10.25105/v5i1.21552>
- Salsabila, N. A., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022). *Analisis regresi data panel pada ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Timur*. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya*, 2.
- Saputri, N. S., & Sri Muniarti. (2023). *Kajian dampak bantuan iuran program jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu*. The SMERU Research Institute. <https://www.smeru.or.id>
- Sari, Y. P. (2025). *Dapatkah dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia?* *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 7(1). <https://doi.org/10.36378/khitmah.v7i1.4061>
- Sari, Y., Soleh, A., & Wafiaziza, W. (2021). *Analisis pengaruh pendidikan dan penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi*. *Jurnal Development*, 9(2). <https://doi.org/10.53978/jd.v9i2.182>
- Septyantie, U. P., & Cahyadin, M. (2013). *Hubungan antara realisasi dana bantuan operasional kesehatan dengan indikator gizi KIA di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(4).
- Supriyanto, A., & Utomo, Y. P. (2024). *Studi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali selama periode 2018–2022*. *Menara Ekonomi*, 10(1). <https://doi.org/10.31869/me.v10i1.5718>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic development* (9th ed.). Erlangga.
- Wahyuni, A. Y., Juanda, B., & Purnamadewi, Y. L. (2021). *Analisis pengaruh alokasi DAK masing-masing bidang terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jwl.9.1.1-17>
- Yuliantoni, S., & Indra Arza, F. (2021). *Pengaruh dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebagai variabel pemoderasi pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode 2015–2019*. *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>